



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJAZIMAH MUQODDAS
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 7269

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.494.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/80 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 311 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 933.000.000
3. Tanah Seluas 37 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 111.000.000
4. Tanah Seluas 311 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.055.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 459 m2/300 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.495.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 220.000.000

1. MOBIL, SUZUKI BALENO HATCHBACK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 67.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.397.054.502

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 9.179.054.502

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.179.054.502

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.